

# KERJA SAMA SELATAN-SELATAN DAN MANFAATNYA BAGI INDONESIA

## *South-South Cooperation and Its Benefit for Indonesia*

**Adirini Pujayanti**

Peneliti Madya Bidang Hubungan Internasional pada  
Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta,  
*email: adirini.pujayanti@dpr.go.id*

Naskah diterima: 17 Februari 2015

Naskah direvisi: 25 Februari 2015

Naskah disetujui: 25 Maret 2015

### **Abstract**

*Indonesian foreign policy is always mentioned by the country's leaders for the sake of achieving national interest. Under the SBY administration, its implementation is carried out by introducing its soft power policy, by offering foreign aids, performing its new role as donor to developing countries through South-South Cooperation (SSC). It is considered by the Indonesian leaders that performing an active role in SSC would give political benefit or positive image for the country. This paper resulted from research report conducted in 2014, adopting a qualitative method of analysis with collecting data activities in Surabaya and Gorontalo. The research is aimed to know how far Indonesia can take benefits from SSC. Its finding concludes that the country's involvement is intended to gain political support from developing countries for the country's political interest in international arena. Unfortunately, it has not yet given significant contribution for the country's economic development, especially in the regions.*

*Keywords: South-South cooperation, Indonesia foreign policy, soft power, national interest.*

### **Abstrak**

Kebijakan luar negeri Indonesia senantiasa dilaksanakan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional. Hal tersebut ditempuh Pemerintah Indonesia dengan kebijakan *soft power* sebagai negara pemberi bantuan dalam Kerja sama Selatan Selatan (KSS) antar negara berkembang. Peran aktif dalam KSS juga menjadi politik prestise bagi Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui manfaat keterlibatan aktif Indonesia di KSS. Tulisan ini merupakan penelitian individu yang dilakukan tahun 2014, dengan pengumpulan data di Surabaya, Jawa Timur dan Gorontalo. Penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian mengungkapkan KSS berdaya guna untuk meraih dukungan bagi kepentingan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Namun belum bermanfaat banyak bagi kepentingan ekonomi dan pembangunan daerah.

Kata kunci: kerja sama Selatan-Selatan, kebijakan luar negeri Indonesia, *soft power*, kepentingan nasional.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peningkatan status Indonesia dari negara berkembang menjadi *middle income country* (MIC) dan anggota G-20, membantu Indonesia berperan dalam berbagai forum internasional guna mencapai target pembangunan nasional. Salah

cara yang ditempuh adalah memberdayakan peran Indonesia sebagai negara pemberi bantuan kepada negara berkembang melalui kebijakan Kerja Sama Selatan Selatan (KSS). Kerja sama Selatan-Selatan merupakan kerjasama pembangunan sesama negara berkembang untuk membangun kemandirian kolektif yang akan memperkuat posisi negara berkembang di forum internasional.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Th. A Choesni, "Kebijakan Kerja sama Pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia", FGD P3DI dengan Direktorat Kerjasama Pembangunan Internasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS pada tanggal 11 Juni 2014.

Bantuan ekonomi negara-negara maju terhadap negara berkembang cenderung mengalami kejenuhan (*aid fatigue*). Aid Fatigue merupakan konsekuensi dari berakhirnya Perang Dingin dan bipolar sistem, redistribusi kekuatan ekonomi diantara negara maju, kesulitan *balance of payment* dan ketidaksetujuan domestik. Hal itu menjadikan bantuan luar negeri tidak lagi menjadi prioritas utama bagi negara maju. Ini merujuk kepada kelambatan untuk bertindak dari negara maju atau badan donor lainnya dalam menanggapi kesulitan negara berkembang.<sup>2</sup> Melalui KSS negara-negara berkembang diharapkan dapat saling membantu dan mengurangi ketergantungan kepada negara maju dalam mengejar ketertinggalannya.

Di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014), kebijakan luar negeri tersebut diarahkan untuk berperan aktif dalam agenda global bidang pembangunan berkelanjutan. Kerja Sama Selatan-Selatan merupakan kelanjutan gagasan kerja sama pembangunan antar negara berkembang yang berawal dari Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955. Semangat KAA tersebut melekat pada kebijakan luar negeri Indonesia menjadi satu kelanjutan kontinum politik luar negeri dari waktu ke waktu. Marty Natalegawa Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2009-2014 menyatakan, politik luar negeri Indonesia merupakan suatu *continuity and change*. Keberlanjutan kebijakan luar negeri dijalankan dengan merujuk pada amanah Konstitusi dan cara pandang Indonesia atas posisi dan peran internasionalnya, sedangkan faktor perubahan ditampilkan melalui inovasi pemikiran yang kemudian diurusutamakan.<sup>3</sup> Dalam implementasinya semangat KAA tersebut terus diarahkan untuk menjalin kerja

sama pembangunan dengan sesama negara berkembang.

Program KSS ditingkatkan dengan keyakinan bahwa Indonesia adalah "*a regional power with global interests and responsibilities*".<sup>4</sup> Sebagai anggota G-20 Indonesia ditempatkan sebagai *emerging economy country*. Meskipun demikian kemampuan ekonomi Indonesia untuk mengalokasikan anggaran bagi KSS belum terlalu besar. Program bantuan luar negeri Indonesia baru berkisar 10 juta dollar AS di tahun 2010. Sementara pada tahun yang sama alokasi anggaran Tiongkok berkisar 2 miliar dollar AS, Brasil 500 juta dollar AS, India 640 juta dollar AS, dan Afrika Selatan 118 juta dollar AS.<sup>5</sup> Namun demikian Indonesia memiliki modalitas lain yang sangat penting, yaitu pengalaman keberhasilannya dalam transisi demokrasi sejak 1998. Hal tersebut menjadi aset dalam pelatihan demokrasi, khususnya bagi negara-negara yang sedang mengalami transisi demokrasi.

Indonesia mengarahkan semua program KSS untuk kepentingan nasional, yang berdasarkan pertimbangan yang bersifat ekonomis, politis, dan pencitraan. Dengan menekankan pendekatan kemitraan melalui cara berbagi pengalaman. Setiap program peningkatan kapasitas yang diberikan kepada negara penerima hendaknya mampu mengubah persepsi atau kebijakan suatu negara terhadap Indonesia menjadi semakin positif, menguntungkan bagi kepentingan nasional Indonesia.<sup>6</sup> Bantuan Indonesia untuk negara berkembang pada umumnya diberikan dalam bentuk hibah dan berbagai bentuk pelatihan diantaranya di bidang pertanian, perikanan, *good government* serta UKM. Sepanjang satu dekade terakhir ini, Indonesia telah menggelar lebih dari 700 program KSS yang bernilai di atas US\$ 60 juta dengan mitra negara-

<sup>2</sup> Lihat Prakash Chandra, *Theories of International Relations*, New Delhi, Vikas Publishing House, 2008, h.143. Bahkan muncul pendapat bantuan luar negeri dari negara maju menimbulkan masalah baru bagi negara berkembang penerimaannya. Baca Farah Abuzeid, *Foreign Aid and the "Big Push" Theory: Lessons from Sub-Saharan Africa*, *Stanford Journal of International Relations*, Vol. XI No. 1, Fall, 2009. h. 17 – 23, [https://web.stanford.edu/group/sjir/pdf/Aid\\_11.1.pdf](https://web.stanford.edu/group/sjir/pdf/Aid_11.1.pdf), diakses 12 Maret 2015.

<sup>3</sup> Teuku Faizasyah, "Kebijakan Luar Negeri Pasca-SBY", *Kompas*, 26 April 2014

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> David Mc Ray. "Membaca Kebijakan Luar Negeri Indonesia", *Kompas*, 5 Maret 2014.

<sup>6</sup> Kemlu Kuatkan Kerjasama Selatan-Selatan Melalui Program yang Terintegrasi, 2013, <http://www.kemlu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=6084&l=id>, diakses 20 Maret 2015.

negara berkembang di Asia, Afrika dan Pasifik Selatan.<sup>7</sup> Dengan berperan aktif dalam KSS posisi Indonesia semakin diperhitungkan di dunia internasional sehingga mempermudah pencapaian kepentingan nasional.

Arus globalisasi yang semakin pesat saat ini telah membawa peluang dan tantangan dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia. Dalam upaya mengefektifkan KSS pemerintah pusat berupaya melibatkan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program KSS.<sup>8</sup> Proses demokratisasi telah membuka peluang keterlibatan Pemda termasuk melakukan interaksi dengan dunia internasional. Sementara arus liberalisasi ekonomi dan politik sebagai efek globalisasi juga menuntut Pemda untuk siap berkiprah di level internasional. Hal tersebut dimungkinkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah mendapatkan ruang yang lebih luas untuk menyelenggarakan hubungan internasional dan berinteraksi langsung di dunia internasional. Peluang ini harus dimanfaatkan Pemda untuk meningkatkan kapasitas pembangunan di daerah.

## B. Perumusan Masalah

Indonesia memiliki harapan besar KSS menjadi *'tools of diplomacy'* bagi kepentingan nasional dan dapat memperkuat posisinya dalam politik internasional. Kerja sama pembangunan melalui KSS ini juga menjadi menarik karena dapat dikatakan sebagai pembumih dari konsep hubungan internasional sangat luas dan besar bagi kepentingan nasional Indonesia. Kerja sama ini diikuti banyak negara berkembang yang akan belajar langsung ke Indonesia. Dalam proses belajar tersebut mereka akan datang ke daerah-daerah di Indonesia yang

dianggap berhasil dalam melaksanakan program pembangunannya. Dengan bersifat lokal-internasional diharapkan menjadi jembatan kerja sama antar daerah antar negara. Kerja sama antar daerah antar negara tersebut sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya saing daerah-daerah di Indonesia di tingkat internasional. Hal tersebut diharapkan dapat memperluas pasar bagi produk Indonesia. Bagaimana KSS dilaksanakan agar bermanfaat luas bagi kepentingan nasional merupakan obyek penelitian ini.

Berdasarkan permasalahan diatas muncul dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan dan implementasi KSS di Indonesia selama ini?
2. Bagaimana peran dan manfaat yang didapat pemerintah daerah sebagai salah satu aktor dalam kebijakan luar negeri untuk berpartisipasi dalam kerja sama ini?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat kebijakan dan implementasi KSS bagi kepentingan nasional Indonesia. Penelitian ini juga untuk mengetahui peran dan manfaat yang didapat pemerintah daerah sebagai salah satu aktor dalam kebijakan luar negeri untuk berpartisipasi dalam kerja sama pembangunan tersebut. Hal tersebut penting diteliti untuk terus meningkatkan kualitas dan efektifitas KSS selanjutnya.

Penelitian ini akan bermanfaat bagi DPR, khususnya Komisi I dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam melaksanakan kebijakan luar negeri, khususnya dalam membina kerja sama internasional.

## D. Kerangka Teori

Kebijakan luar negeri pada dasarnya merupakan strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.<sup>9</sup> Di dalam istilah yang lebih luas lagi, kebijakan luar negeri adalah pola perilaku

<sup>7</sup> Boediono: Negara Selatan-Selatan Harus Siap Hadapi Tantangan, <http://finance.detik.Com/read/2012/07/10/130754/1961963/4/1/boediono--negara-selatan-selatan-harus-siap-hadapi-tantangan>, diakses 6 November 2014.

<sup>8</sup> Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Kerjasama Teknik, *Tabloid Diplomasi*, No. 22 Tahun II, tanggal 15 Agustus – 14 September 2009, Jakarta, Pusdiklat Kementerian Luar Negeri, h. 14.

<sup>9</sup> M. Sabrie, *Politik Bebas Aktif*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1997, h.10.

yang digunakan oleh suatu negara ketika memperjuangkan kepentingannya dalam hubungan dengan negara-negara lain.

Menurut John Rosenau<sup>10</sup> pelaksanaan kebijakan luar negeri harus memperhatikan keterkaitan antara faktor-faktor domestik dan peran diplomasi suatu negara. Dibutuhkan berbagai strategi penyesuaian oleh faktor-faktor domestik agar memperoleh posisi dalam percaturan internasional. Kemampuan penanganan masalah-masalah domestik dengan dan melalui penyesuaian struktur dan kebijakan akan sangat menentukan berhasil tidaknya politik luar negeri sebuah negara. Hal ini mengungkapkan adanya keterkaitan antara politik dalam negeri dengan politik luar negeri. Artinya kebijakan politik luar negeri yang dibuat oleh suatu negara sangat terkait dengan masalah dalam negeri negara bersangkutan.

Selain faktor domestik, perumusan kebijakan luar negeri suatu negara juga dipengaruhi oleh konstelasi politik internasional yang dicirikan oleh hubungan yang asimetris antara negara maju dengan negara berkembang.<sup>11</sup> Baik faktor domestik maupun internasional ini sifatnya dinamis karena acapkali dari sana muncul tuntutan perubahan. Sebagai akibatnya setiap negara harus selalu memperhitungkan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat mengingat setiap perubahan akan melahirkan tantangan dan harapan baru.

Seiring dengan aktifnya Indonesia dalam KSS, terbuka peluang bagi pemerintah daerah untuk turut berperan. Keterlibatan daerah dalam kerjasama ini sangat menarik karena merupakan suatu bentuk kerjasama internasional yang dapat dirasakan lebih dekat manfaatnya bagi masyarakat karena bersifat lokal-internasional. Dengan adanya paradigma baru ini, tentunya mengubah pemahaman yang selama ini ada bahwa hubungan luar

negeri merupakan monopoli pemerintah pusat. Pemerintah Daerah dapat menjadi aktor efektif bagi perjuangan diplomasi Indonesia dilingkup hubungan internasional. Hal ini dimungkinkan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan lebih keleluasaan kepada daerah untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pihak asing.

Makin beragamnya aktor pelaku hubungan luar negeri tersebut akan memperkuat Indonesia melaksanakan model diplomasi multi-jalur (*multitrack diplomacy*) untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik luar negeri Indonesia. Diplomasi multi-track dalam melaksanakan politik luar negeri berakibat pada munculnya elemen "*transendental*" yang menipiskan sekat tebal yang menghubungkan faktor internasional dan faktor domestik dalam mengelola diplomasi.<sup>12</sup> Artinya, diplomasi tidak lagi hanya dipahami dalam kerangka peranan pusat untuk memproyeksikan kepentingan nasional Indonesia ke luar, tapi juga menuntut kemampuan dan kejelian para pejabat dan instansi terkait untuk mengkomunikasikan perkembangan perkembangan dunia luar ke dalam negeri. Hal ini merupakan *intermestik politics* sehingga manfaat dari hubungan luar negeri dapat benar-benar diarahkan untuk mencapai kepentingan nasional.<sup>13</sup>

Pemberdayaan seluruh aktor internasional dalam kerjasama luar negeri diharapkan dapat mewujudkan suatu diplomasi yang integratif dan melibatkan semua komponen bangsa dalam suatu sinergi yang disebut diplomasi total.<sup>14</sup> Orientasi praksis kebijakan ini adalah menempatkan substansi permasalahan secara integratif, terutama dalam perspektif

<sup>10</sup> Untuk lengkapnya, baca, Theodore A. Coulumbus dan James H. Wolfe, *Introduction to International Relations: Power and Justice*, New Jersey, Prentice Hall Inc., Second Edition, 1982, h. 109.

<sup>11</sup> Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Hubungan Internasional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005, h.77-79.

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 09/A/Kp/Xii/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah, <http://www.kemlu.go.id/Books/Buku%20Panduan%20Umum%20Tata%20Cara%20Hub%20dan%20Kerjasama%20LN%20oleh%20Pemda.pdf>, diakses 14 April 2014.

<sup>13</sup> A New Foreign Policy Era, [http://www.pearsonhighered.com/assets/hip/us/hip\\_us\\_pearsonhighered/samplechapter/0205853641.pdf](http://www.pearsonhighered.com/assets/hip/us/hip_us_pearsonhighered/samplechapter/0205853641.pdf) diakses 14 April 2014.

<sup>14</sup> Malcolm N. Shaw, *International Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, Bab V.

internasional-domestik. Cara pandang tersebut menciptakan korelasi erat dan timbal balik antara dinamika hubungan internasional dan realitas domestik Indonesia dalam skala yang lebih luas.

Kebijakan KSS merupakan elemen *soft power diplomacy* yang diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Kerja sama Selatan-Selatan sendiri merupakan bagian dari penguatan kebijakan luar negeri *soft power* Indonesia dalam setiap *conflict resolution*. Pada saat ini, para pelaku hubungan internasional menyadari bahwa penggunaan *hard power* sebagai wujud unilateralisme ternyata tidak serta merta menyelesaikan masalah. Sebaliknya, penggunaan *soft power* justru semakin menguat dalam upaya menyelesaikan permasalahan dunia. Menurut Joseph S. Nye, *soft power diplomacy* merupakan cara lain untuk mencapai tujuan atau seringkali disebut sebagai *the second face of power* yang merupakan kemampuan diplomasi untuk mengarahkan secara tidak langsung kepentingan nasionalnya terhadap negara lain melalui kerjasama tanpa kekerasan.<sup>15</sup> *Soft power* tidak bersifat memaksa namun lebih pada kemampuan untuk membujuk melalui daya tarik yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Sebuah negara harus mempunyai kekuatan daya tarik yang besar sehingga negara lain akan secara sukarela menyetujui kebijakannya. Daya tarik sebuah negara hanya akan berhasil tergantung pada kredibilitas negara pelaku dan rasa sensitif terhadap kepentingan pihak lain dalam merumuskan kebijakan luar negeri.<sup>16</sup> Daya tarik sebuah negara untuk mempengaruhi negara lain dapat diupayakan melalui kebudayaan, nilai-nilai politik dan kebijakan luar negerinya yang mempunyai kekuatan moral.<sup>17</sup> Melalui pendekatan ini hubungan antar negara dapat diterima dengan lebih terbuka dan harmonis karena tidak terjadi keterpaksaan. Negara didorong untuk memahami lawannya, memberi

ruang untuk belajar menghargai kebudayaan dan siap menerima dan membuka dialog demi kepentingan bersama.

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Tempat dan Waktu

Penelitian lapangan untuk penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Gorontalo. Pemilihan lokasi dengan pertimbangan Provinsi Jawa Timur selama ini diketahui aktif dan siap dalam menjalin kerja sama dengan pihak luar negeri, dan memiliki biro administrasi kerja sama yang kreatif dan inovatif dalam menjalin kerja sama dengan luar negeri. Provinsi ini juga cukup antusias berpartisipasi dalam pelaksanaan KSST dalam hal berbagi pengalaman, pengetahuan dan pelatihan di bidang peningkatan kapabilitas SDM, perikanan dan pertanian dan pelaksanaan *Good Governance*. Jatim juga bertekad untuk terus meningkatkan dan memperluas kerja sama dengan pihak luar negeri karena menyadari kerja sama internasional merupakan tuntutan yang harus dilakukan di era globalisasi saat ini.<sup>18</sup>

Adapun pemilihan Provinsi Gorontalo karena provinsi ini memiliki peluang besar untuk menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga mitra/donor internasional. Ini menyusul ditetapkannya Gorontalo sebagai pilot project Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST oleh UNDP di tahun 2012). Oleh karena itu Provinsi Gorontalo sudah harus memiliki lembaga yang khusus menangani kerja sama. Lembaga khusus kerja sama ini nantinya mempunyai tugas pokok dan fungsi seperti: menginventarisir dan memetakan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan; menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan; memberikan saran terhadap proses pemilihan subjek daerah dan pihak ketiga; menyiapkan kerangka acuan (proposal), termasuk materi kesepakatan kerja sama; serta memberikan rekomendasi baik kepada pemerintah daerah maupun pihak

<sup>15</sup> Joseph Nye, *Soft Power – The Means to Success in The World Politics*, NY: Public Affairs, 2004, h.5.

<sup>16</sup> Joseph S. Nye Jr., "Propaganda Isn't the way: Soft Power," *International Herald Tribune*, 10 Januari 2003, h.8.

<sup>17</sup> *Op.cit.*, h.11.

<sup>18</sup> *Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Tahun 2010*, Biro Administrasi Kerja sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011.

ketiga.<sup>19</sup> Adapun waktu penelitian ke daerah dilaksanakan di bulan Juni dan Juli 2014.

## 2. Pengumpulan Data

Pertama-tama pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder terkait dengan permasalahan yang diteliti. Setelah memperoleh data yang diperlukan, penelitian dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak-pihak yang terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data juga dilakukan melalui Forum Group Discussion (FGD). Di Jakarta diadakan FGD diadakan dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan Bappenas. Adapun pihak yang diwawancarai dalam penelitian lapangan diantaranya Ibu Winarni Monoarfa Sekda Gorontalo dan jajarannya, Ibu Baiq L.S.W. Wardhani dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga, Bapak Cipto Wibowo Kasub Kerja sama Asia Afrika Biro Administrasi Kerja Sama Pemda Jatim, dan Bapak Dadeng Gunawan Kabid Regional Pusat Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian.

## 3. Metode Analisis Data

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena sangat relevan dengan tujuan dari penelitian yang ingin mendapatkan gambaran tentang KSS dan manfaatnya bagi Indonesia. Analisis data dilakukan melalui dua proses yaitu reduksi data dan interpretasi sehingga ditemukan jawaban dari permasalahan yang ingin dicari dalam penelitian. Reduksi data adalah memilah data agar teratur dengan menyusun berdasarkan kategori dan merangkumnya. Sedangkan interpretasi adalah mendapatkan makna dan pemahaman dari kata-kata dan perilaku para partisipan riset dengan

<sup>19</sup> "Gorontalo harus punya lembaga khusus kerjasama", 9 November 2012, <http://www.gorontalooprov.go.id/pemerintahan/236-gorontalo-harus-punya-lembaga-khusus-kerjasama?tmpl=component&print=1&page=>, diakses 18 Maret 2015.

memunculkan konsep dan teori yang menjelaskan temuan di lapangan.<sup>20</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kebijakan dan Implementasi Kerja Sama Selatan-Selatan di Indonesia

#### 1. Pengaruh Gerakan Non Blok dan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Sejarah keterlibatan Indonesia dalam KSS dimulai saat Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Pelaksanaan KSS merupakan langkah nyata untuk mewujudkan solidaritas dan penguatan *collective action* di antara negara-negara berkembang membentuk 'satu front tersendiri' untuk mencapai kondisi yang lebih baik yang dilandasi oleh nilai-nilai kebersamaan, kesetaraan, dan keadilan.<sup>21</sup> Bagi Indonesia keterlibatan ini merupakan implementasi dari Pembukaan UUD 45 "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Indonesia berupaya mendorong negara-negara berkembang untuk bekerja sama menciptakan peluang pertukaran pengetahuan dan inovasi bagi kemajuan bersama.

Kerja sama ini terus mengalami transformasi dan penguatan melalui beberapa tahapan penting setelah Konferensi Asia Afrika tahun 1955, diantaranya terbentuknya Gerakan Non Blok tahun 1961, Kelompok-77 tahun 1964, Kelompok 15 tahun 1989, Kelompok D-8 tahun 1997, South Summit di Kuba dan Qatar tahun 2000 dan 2005, Resolusi PBB No. 58/220 tentang pembentukan *High Level Committee on South-South Cooperation* dan *Bogota Statement: Towards Effective and Inclusive Development Partnerships* tahun 2010.<sup>22</sup> Dalam

<sup>20</sup> C. Daymon C. & I. Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif*, penerjemah Cahya Wirtama, Yogyakarta, Benteng, 2008, h. 369.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Baiq Wardani, Dosen Fisip Universitas Airlangga, pada tanggal 24 Juni 2014.

<sup>22</sup> *Bogota Statement* tahun 2010 menyatakan: "Kerjasama Selatan-Selatan adalah cermin solidaritas, penyesuaian dengan konteks lokal dan kapasitas, dan mempromosikan kerja sama saling menguntungkan dan *win-win outcomes* dalam kemitraan horizontal. Kerjasama Selatan-Selatan bukanlah pengganti tetapi pelengkap kerja sama pembangunan Utara-Selatan. Soemadi D.M. Brotdiningrat, Grand Design Baru Kerja Sama Selatan-Selatan, *Jurnal Diplomasi*, Kementerian Luar Negeri, edisi April 2012.

konteks Gerakan Non-Blok (GNB), lahirnya Non Aligned Movement Centre for South-South Technical Cooperation (NAM CSSTC) di Jakarta pada tahun 1995. Hal ini semakin membuka peluang bagi Indonesia untuk berperan aktif di dalam membantu pembangunan tidak saja negara-negara anggota GNB, tetapi juga negara bukan anggota GNB. NAM CSSTC menjadi wahana bagi penyelenggaraan program-program peningkatan kapasitas negara berkembang.

Meskipun filosofi pembangunan ini sudah ada sejak lama, KSS kini lebih mendapat sorotan, seiring negara-negara berkembang semakin meraih bobot dalam perekonomian dunia, yang juga terkait dengan adanya kekecewaan atas model konvensional kerja sama pembangunan. Suatu definisi standar yang berlaku secara internasional terhadap KSS memang belum ada. Berbagai organisasi dan perorangan memberikan beragam definisi. Beragamnya definisi ini mencerminkan sudut pandang luas atas konsep tersebut, dan bahwa KSS telah menjadi agenda internasional. Perkembangan KSS tidak dapat dilepaskan dari upaya-upaya PBB di dalam membantu negara-negara berkembang mengatasi keterbelakangannya. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan KSS sebagai:

“...diawali, diselenggarakan, dan dikelola oleh negara berkembang sendiri; biasanya dilakukan oleh Pemerintah dengan keikutsertaan aktif lembaga sektor publik dan swasta, organisasi non-pemerintah, dan perorangan. Kerja sama dilakukan dalam bentuk-bentuk yang berbeda dan terus berkembang, yaitu misalnya berbagi pengetahuan dan pengalaman, pelatihan, alih teknologi, kerja sama keuangan dan moneter serta kontribusi bukan uang (*in-kind*). Kerja Sama Selatan-Selatan dapat mencakup sektor yang berbeda-beda, dan bersifat bilateral, multilateral, sub-regional atau antar regional.”<sup>23</sup>

KSS merupakan komponen pelengkap yang penting bagi kerjasama Utara-Selatan dalam mendorong kerjasama internasional di bidang pembangunan. KSS sebagai model kerjasama

<sup>23</sup> Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kerja Sama Selatan-Selatan, “What is South-South Cooperation?” [http://ssc.undp.org/content/ssc/about/what\\_is\\_ssc.html](http://ssc.undp.org/content/ssc/about/what_is_ssc.html) diakses 26 Maret 2015.

pembangunan semakin berkembang seiring dengan makin meningkatnya peran *Middle Income Country* (MIC) dalam pembangunan negara berkembang. Sebagaimana yang disepakati dalam forum internasional, seperti *Buenos Aires Plan of Action* (BAPA), *Accra Agenda for Action* (AAA), dan *High Level Meeting on Aid Effectiveness* di Busan dan G-20, penguatan KSS menjadikan MIC sebagai instrumen penting dalam membentuk *a new perspective architecture of aid for development effectiveness*.<sup>24</sup>

Selama ini kerjasama pembangunan identik dengan bantuan keuangan, alih teknologi dan solusi dari negara maju ke negara berkembang. Melalui KSS diharapkan ada cara lain dalam kerja sama pembangunan yaitu melalui sistem kemitraan berbagi pengalaman diantara sesama negara berkembang. KSS membangun dan mengembangkan institusi-institusi yang dapat berperan sebagai ‘simpul-simpul jaringan pertukaran pengetahuan atau *knowledge hubs*’ – mengumpulkan pembelajaran dan membangun jaringan pengetahuan secara lebih sistematis.<sup>25</sup> Penguatan dan pengembangan monitoring, evaluasi sistem informasi dan database sebagai dasar *knowledge sharing*, dan mendukung *business process* KSS. Cara ini dipilih karena pertukaran pengetahuan merupakan salah satu instrumen penting untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal. Banyak sekali praktek dan pengalaman terbaik yang justru dapat diperoleh dari negara-negara berkembang, dan dapat dijadikan masukan untuk merespon berbagai persoalan pembangunan di negara-negara berkembang yang lain. Oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah memastikan bagaimana pengalaman dan praktek-praktek terbaik tersebut dapat diperoleh dan dibagi diantara sesama negara berkembang.

<sup>24</sup> Kebijakan Kerja Sama Pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia, FGD P3DI dengan Tb. A Choesni, Direktur Kerjasama Pembangunan Internasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Ketua Tim Pelaksana, Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular pada tanggal 11 Juni 2014.

<sup>25</sup> Membangun Simpul Jaringan Pengetahuan AntarNegara Berkembang, siaran pers the World Bank, 10 Juli 2012, <http://www.worldbank.org/> diakses 23 oktober 2014.

## 2. Implementasi dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Kebijakan KSS Indonesia sangat bersifat *state centris*.<sup>26</sup> Indonesia berkomitmen untuk menjadi satu simpul penting dalam jaringan pengetahuan KSS. Bidang-bidang pembangunan yang diminati dari Indonesia terkait dengan ketahanan pangan dan energi, mitigasi bencana berbasis masyarakat, tata kelola pemerintahan dan upaya membangun perdamaian dalam konteks penyelesaian konflik dan demokrasi, dan bidang perekonomian yang mencakup keuangan publik dan keuangan mikro.<sup>27</sup> Indonesia melaksanakan KSS dengan berpedoman pada UU No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Dalam RPJPN tersebut Pemerintah Indonesia merupanya mewujudkan Indonesia yang memiliki daya saing dan berperan penting dalam di dunia internasional. Oleh karena itu sejak tahun 1981, Pemerintah Indonesia mulai aktif mengadakan kerjasama teknis dengan membentuk *Indonesian Technical Cooperation Program* (ITCP) yang bertujuan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang pengalaman pembangunan yang dianggap sukses di Indonesia melalui program pelatihan dan pertukaran ahli dengan dukungan dari negara donor internasional. Kerja sama teknik ditujukan untuk meningkatkan kemitraan antar berbagai negara khususnya negara berkembang, guna mendukung pembangunan di berbagai bidang. Dengan berbagi pengalaman pembangunan Indonesia berupaya menjadi negara pemberi, atau pada tingkatan tertentu telah menjadi donor atau *resource country*. TCP secara berkelanjutan menawarkan bantuan teknis yang terangkum dalam *Technical Cooperation among Developing Countries Program* (TCDC).

Dasar pelaksanaan KSS selanjutnya adalah *Jakarta Commitment on Aid for Development Effectiveness 2009* yang bertujuan meningkatkan

tata kelola bantuan internasional dan memperkuat KSS dan Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-20. Dalam RPJMN 2010-2014, KSS dinyatakan sebagai salah satu prioritas pembangunan pada pembangunan politik luar negeri dan kerjasama ekonomi. Kerangka kerja KSS di Indonesia ditujukan untuk pengembangan kapasitas, peningkatan investasi dan kerja sama pembangunan internasional. Program kerja sama internasional dikembangkan dalam bentuk kerjasama yang berbeda antara Indonesia dan negara-negara mitra. Kerjasama ini bisa saja awalnya merupakan kerjasama pemerintah-pemerintah (*G-to-G*) atau universitas-universitas (*U-to-U*), yang kemudian diubah menjadi kerjasama bisnis. Untuk memiliki manfaat yang lebih luas dan bersifat jangka panjang, selanjutnya dapat dibentuk kerja sama antar-pemerintah dengannya kesepahaman bilateral. Hal ini akan menjadi payung bagi kerjasama antara kedua negara untuk lebih meningkatkan produktifitas, dan diversifikasi kerjasama antar-negara.

Di tahun 2010 dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia, yang terdiri dari 4 Kementerian/Lembaga.<sup>28</sup> Kementerian Luar Negeri, membidangi kebijakan luar negeri dan diplomasi. Bappenas fokus pada kebijakan nasional, kerjasama pembangunan dan penganggaran. Kementerian keuangan fokus pada kebijakan fiskal dan APBN. Sekertariat Negara fokus pada dukungan dan fasilitas. Sedangkan para agen pelaksana ialah kementerian atau instansi terkait, Pemda, swasta, dan LSM. Tim tersebut bertugas untuk mendesain *Blue Print* dan *Grand Design Indonesia South-South Cooperation*, dengan fokus pembangunan ekonomi yang mengarah pada perdagangan internasional dan memperkuat diplomasi internasional

<sup>26</sup> Wawancara dengan Baiq Wardani, Dosen Fisip Universitas Airlangga, pada tanggal 24 Juni 2014.

<sup>27</sup> <http://www.worldbank.org>. Op.cit.

<sup>28</sup> Kementerian luar negeri membentuk Direktorat KST di tahun 2006 untuk melaksanakan program kerja sama teknik. Dengan berpegang pada prioritas kebijakan luar negeri, Kementerian luar negeri melaksanakan program peningkatan kapasitas. berkoordinasi dengan instansi teknis, LSM, Universitas dll. Wawancara Siti Nugraha Maulidiah, pada tanggal 11 Juni 2014.

yang dilaksanakan secara bertahap. Tahap 1 dilaksanakan pada 2011-2014 berupa koordinasi yang lebih kuat dalam direvitalisasi Kerangka Kelembagaan. Tahap 2 dilaksanakan pada 2015-2019 berupa pemunculan Mitra baru untuk Inovasi Kerja Sama Pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular. Tahap 3 dilaksanakan pada 2020-2025 berupa kemitraan yang lebih kuat dalam Inovatif dan Inklusif KSS.

### 3. Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)

Konferensi PBB di Argentina pada tahun 1978 menjadi sejarah terbentuknya Buenos Aires Plan of Action (BAPA) yang menjadi tonggak bagi Kerja sama Teknik antar negara berkembang (KTNB). Majelis Umum PBB melalui berbagai resolusi dan keputusannya telah menegaskan arti penting dan validitas KTNB dan semua negara dan badan-badan PBB telah dihimbau untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang ada di BAPA. KTNB yang pada dasarnya adalah Kerjasama Teknik Selatan-Selatan yang bertujuan untuk percepatan kemandirian pembangunan di negara-negara berkembang.

Ada peningkatan kecenderungan bagi negara-negara untuk terlibat dalam berbagai prakarsa terkait dengan KSST. Sejumlah besar mitra penyedia (*provider*) dalam Kerja Sama Selatan-Selatan juga menjalankan kerja sama triangular, terutama dengan negara-negara di dalam kawasan mereka sendiri. Di Asia, negara-negara penting meliputi India, Malaysia, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand dan Vietnam. Di Amerika Latin, hampir semua negara adalah penyedia Kerja Sama Selatan-Selatan, dengan Argentina, Brasil, Cile, Kolombia dan Meksiko sebagai yang teraktif. Negara-negara utama di Afrika adalah Mesir, Kenya, Maroko, Afrika Selatan, dan Tunisia. Arab Saudi, China, Venezuela, dan India menyumbang lebih dari 76% dari perkiraan jumlah keseluruhan arus ODA yang berasal dari 16 kontributor Selatan berperingkat tertinggi pada tahun 2008. Sebagian besar anggota Komite Bantuan Pembangunan (*Development Assistance Committee – DAC*) pada *Organisation*

*for Economic Cooperation and Development* (OECD) terlibat dalam kerja sama triangular.<sup>29</sup>

Seiring dengan implementasi kerja sama Selatan-Selatan, Indonesia juga lazim melaksanakan Kerja Sama Triangular yaitu kerja sama antara tiga pihak: negara atau lembaga mitra pembangunan, Indonesia, dan negara penerima manfaat. Istilah “Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular” (selanjutnya disingkat KSST)<sup>30</sup> lebih lazim digunakan di Indonesia untuk merujuk pada semua kegiatan kerja sama pembangunan, baik yang bersifat bilateral (Selatan-Selatan) maupun yang melibatkan mitra pembangunan (Triangular).

Semakin penting KSST membuka jalan bagi Indonesia untuk meningkatkan perannya di dunia internasional, khususnya karena saat ini Indonesia sedang dalam transisi menjadi penyedia kerja sama pembangunan. Indonesia memiliki tiga skema pembiayaan untuk program KSST yaitu melalui Rupiah murni (APBN), kerja sama segi tiga dengan donor, pembiayaan bersama antara Indonesia dengan negara penerima, serta pembiayaan penuh dari negara donor atau organisasi internasional.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> The Reality of Aid Management Committee, “South-South Development Cooperation: A Challenge to the Aid System?” Laporan Khusus tentang Kerja Sama Selatan-Selatan (2010) dalam Studi mengenai Implementasi Kebijakan dan Strategi Kemitraan Pendanaan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular, 22 December 2014, <http://www.csis.or.id/index.php/research/past-research/studi-mengenai-implementasi-kebijakan-dan-strategi-kemitraan-pendanaan-kerja-sama-selatan-selatan-dan-triangular.html>, diakses 25 Maret 2015.

<sup>30</sup> Menurut sebuah Laporan Khusus Bank Dunia, Kerja Sama Triangular melibatkan “donor tradisional dari jajaran Development Assistance Committee (DAC) OECD, donor baru di Selatan, dan sebuah negara penerima manfaat di Selatan.” Kerja sama triangular ini telah menduduki tempat utama dalam agenda pembangunan global dan dalam dokumen-dokumen kebijakan seperti Pernyataan Bogota dan Laporan Sekretaris Jenderal PBB 2010 tentang kerja sama pembangunan. Lihat Guido Ashoff, “Triangular Cooperation: Opportunities, Risks, and Conditions for Effectiveness,” dalam *Development Outreach*, terbitan 10/08/2010 The World Bank Institute, 2010.

<sup>31</sup> Kebijakan Kerja sama Pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia, FGD P3DI dengan Tb. A Choesni, Direktur Kerjasama Pembangunan Internasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Ketua Tim Pelaksana, Tim Koordinasi Nasional Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular pada tanggal 11 Juni 2014.

Kerja sama segi tiga dengan donor atau Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) merupakan kerja sama pembangunan yang melibatkan dua atau lebih negara-negara berkembang dan bekerjasama dengan pihak ketiga (*third party*). Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengusung visi KSST Indonesia “*Better Partnership for Prosperity*”, tujuan dari kerja sama ini adalah adanya *cost sharing* antara Indonesia dengan donor asing (dapat berupa negara ataupun Organisasi Internasional). Indonesia telah menjalin dan mengembangkan kerja sama triangular dengan 16 Negara: Amerika Serikat, Australia, Austria, Argentina, Belanda, Brazil, Canada, Denmark, Inggris, Jepang, Jerman, Norwegia, Swedia, Swiss, Thailand, Turki) dan 8 Organisasi Internasional (Asia Foundation, Colombo Plan, G-15, Islamic Development Bank, FAO, UNESCO, UNDP, Bank Dunia, *Japan International Cooperation Agency* (JICA), dan *United Nations Development Programme* (UNDP), GTZ dan UNIDO).

Pemerintah Indonesia memberikan kontribusi bagi pelaksanaan dan pengembangan KSST hingga US\$ 49,8 million (2000 – 2013).<sup>32</sup> Prioritas KSST terbagi dalam 3 program tematik berdasarkan keunggulan komparatif. *Pertama*, bidang pembangunan, termasuk program pengentasan kemiskinan (PNPM), inseminasi buatan untuk ternak (BBIB), manajemen risiko bencana; keluarga berencana. *Kedua*, *good governance and peacebuilding*, termasuk demokrasi, perdamaian, penegakan hukum, program pembangunan daerah. *Ketiga*, bidang lain: perencanaan dan penganggaran, infrastruktur, pendidikan. Untuk itu, Indonesia melakukan urutan persiapan agar KSST berjalan efektif. Dimulai dengan penyusunan daftar prioritas, karena keterbatasan anggaran harus dibuat prioritas sesuai dengan kepentingan nasional RI dan dan sesuai kebutuhan negara penerima. Penyusunan daftar prioritas tersebut dilakukan berdasarkan masukan dari

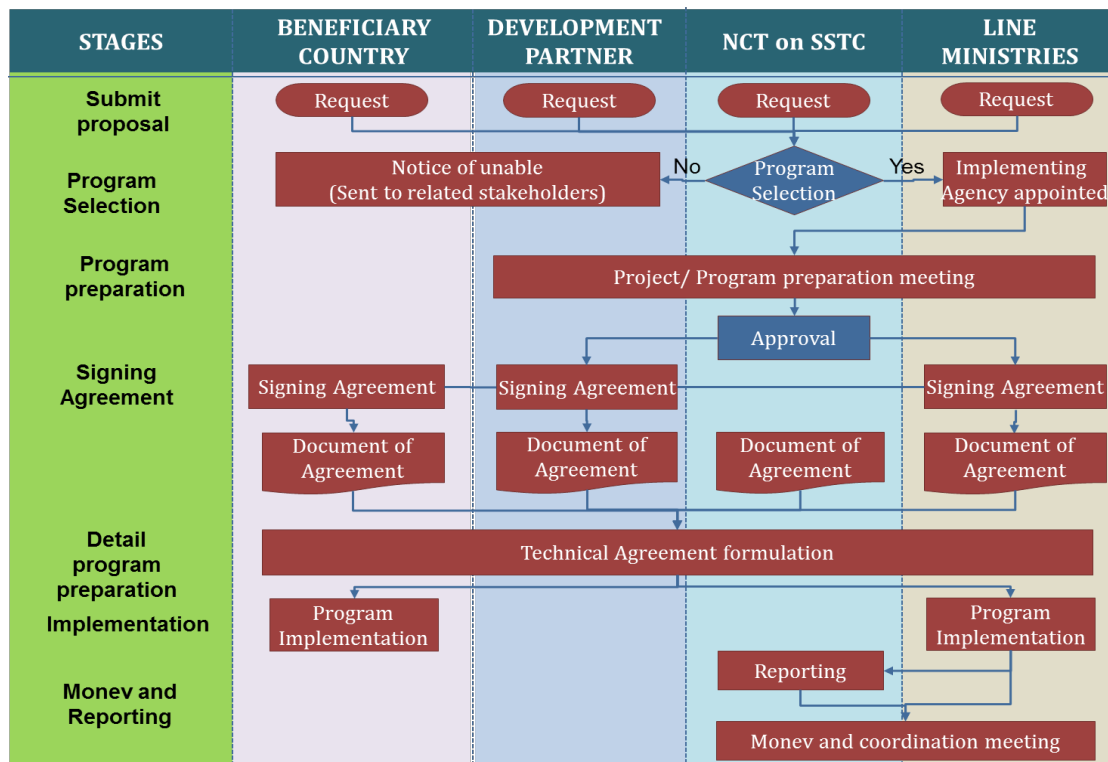
<sup>32</sup> FGD P3DI dengan Siti Nugraha Maulidiah, Direktur Kerja sama Teknik Direktorat kerja sama Teknik, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri pada tanggal 11 Juni 2014.

Perwakilan/KL, kedutaan asing di Indonesia, pengolahan data dan masukan serta koordinasi Internal dan Interkementerian. Selanjutnya disusun daftar kapasitas, sebagai alat promosi dan agar terjadi kecocokan dengan kebutuhan dan kapasitas. Dimulai dari Kementerian Luar Negeri, koordinasi dengan Kementerian / Lembaga/ Instansi terkait dan diseminasi informasi, sebagaimana yang tergambar pada tabel 1.

Minat negara-negara berkembang untuk ikut dalam KSS sangat tinggi. Semua program dan kegiatan adalah berbasis permintaan (*demand-driven*) tanpa mekanisme jelas dan pendekatan seutuhnya terhadap pemilihan dan perencanaannya. Pendekatan berbasis permintaan artinya melakukan kegiatan terutama berdasarkan kebutuhan negara penerima manfaat. Ini berarti bahwa: (1) Lebih ada kejelasan mengenai apa yang dibutuhkan oleh negara penerima, karena bantuan tersebut memang diminta oleh mereka; dan (2) Ini akan menghindari praktik untuk memiliki “agenda tersembunyi” dalam kerja sama pembangunan internasional, yaitu merancang dan menerapkan program tersebut pada negara penerima manfaat berdasarkan kepentingan Indonesia tanpa memprioritaskan kebutuhan negara penerima manfaat. Belajar dari pengalaman banyak negara bantuan pembangunan tradisional, jelas bahwa sangat sedikit negara yang bersedia bekerja sama dengan negara-negara yang secara gamblang memperagakan kepentingan ekonomi dan politik mereka sebagai motif utama kerja sama.<sup>33</sup> Semua kegiatan tersebut dilakukan secara *ad-hoc*, oleh sebab itu, tidak ada keberlanjutan kegiatan. Dari *mapping* prioritas negara peminat kerja sama teknik tiap tahunnya, Pemerintah Indonesia membuat prioritas berdasarkan kepentingan nasional dalam hal penentuan

<sup>33</sup> CSIS, Laporan Khusus tentang Kerja Sama Selatan-Selatan (2010) dalam Studi mengenai Implementasi Kebijakan dan Strategi Kemitraan Pendanaan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular, 22 December 2014, <http://www.csis.or.id/index.php/research/past-research/studi-mengenai-implementasi-kebijakan-dan-strategi-kemitraan-pendanaan-kerja-sama-selatan-selatan-dan-triangular.html>, h.77 - 78, diakses 25 Maret 2015.

Tabel 1.  
**STANDARD OPERATING PROCEDURE UNTUK TRIANGULAR COOPERATION**



Sumber: Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional Bappenas 2013.

negara penerima dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Kementerian luar negeri mengelompokkan negara-negara tersebut ke dalam 3 kelompok yaitu :

1. Skala A berdasarkan tingginya kepentingan nasional Pemerintah Indonesia di bidang politik di negara tersebut (mendukung NKRI, mendukung stabilitas kawasan, dan komitmen pejabat setingkat kepala negara/Menteri)
2. Skala B berdasarkan kepentingan Pemerintah Indonesia di bidang ekonomi (peluang investasi dan kerja sama ekonomi lainnya)
3. Skala C difokuskan pada kepentingan nasional Pemri di bidang sosial budaya diantara peningkatan citra positif Indonesia di negara tersebut.<sup>34</sup>

Dengan pertimbangan tersebut kegiatan KSST sepanjang tahun 2006 – Mei 2014 hanya berhasil menyelesaikan 72 program, 1130 peserta dari 55 negara.<sup>35</sup> Program pelatihan bidang pertanian paling diminati sehingga

dikatakan pertanian menjadi “amunisi” diplomasi dan memainkan peranan penting dalam *soft power* diplomasi luar negeri Indonesia dalam KSS. Bidang pertanian menonjol karena merupakan isu utama di negara-negara berkembang yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani. Indonesia banyak memberi pelatihan di bidang teknologi agro-bisnis hortikultura, sistem produksi bibit, teknologi paska panen, masalah peternakan dan perikanan. Kerjasama bidang pertanian dianggap sebagai model yang efektif karena merupakan kebutuhan setiap negara dan bantuan di bidang pertanian terbukti selalu menguntungkan masing-masing pihak. Negara penerima terbantu karena mendapat ilmu, sedangkan Indonesia terbantu mempromosikan produk alat pertaniannya di dunia internasional. Pertanian Indonesia menjadi rujukan anggota KSS, karena Indonesia pernah berhasil mencapai swasembada beras di tahun 1984. Di masa Pemerintahan Presiden Suharto, Indonesia mendapat penghargaan medali bertuliskan “*from rice importer to self sufficiency*” dari Food and Agriculture Organization (FAO) di tahun

<sup>34</sup> Sumber: Direktorat kerjasama Teknik, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri 2014.

<sup>35</sup> *Ibid.*



dukungan untuk memerdekakan Papua dari NKRI. Oleh karena itu sebagai upaya tandingan Indonesia berupaya menumbuhkan hubungan baik dengan negara-negara di kawasan tersebut melalui kerja sama yang lebih erat. Dalam upaya ini program bantuan KSS menjadi andalan diplomasi Pemerintah Indonesia meraih simpati politik negara-negara di kawasan Pasifik Selatan.

Kemampuan diplomasi Indonesia sangat menentukan keberhasilan meredam isu Papua merdeka di Pasifik Selatan. Pemerintah Indonesia harus dapat “mengajak” negara-negara di kawasan tersebut untuk mendukung NKRI. Internasionalisasi masalah Papua oleh pihak yang tidak bertanggung jawab diharapkan bisa diatasi dengan cara menjalin hubungan harmonis dengan negara-negara di Pasifik Selatan dengan memperluas jejaring *friends of Indonesia*. Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan persahabatan, kerja sama, dan kemitraan dengan negara-negara di kawasan tersebut untuk meraih simpati dan kepercayaan pihak-pihak yang berlawanan politik. KSS menjadi alat *soft power diplomacy* Indonesia yang paling tepat terhadap kawasan pendukung Papua merdeka tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 dimana 10 negara di kawasan Pasifik Selatan menjadi negara prioritas A dalam list kerjasama KSS dari 24 negara yang terdaftar dalam list tersebut.

Tabel 2.

**MAPPING PRIORITAS NEGARA KERJA SAMA TEKNIK TAHUN 2013**

| URUTAN PRIORITAS   | NEGARA       |
|--|--------------|
| Skala A berdasarkan tingginya kepentingan nasional Pemri di bidang politik di negara tersebut (mendukung NKRI, mendukung stabilitas kawasan, dan komitmen pejabat setingkat kepala negara/Menteri) |              |
| 1.   | Palestina    |
| 2.   | Afghanistan  |
| 3.   | Timor Leste  |
| 4.   | Myanmar      |
| 5.   | Vanuatu      |
| 6.   | Papua Nugini |
| 7.   | Kamboja      |

| URUTAN PRIORITAS   | NEGARA  |
|--|---|
| 8.   | Fiji  |
| 9.   | Laos  |
| 10.  | Solomon Islands                                     |
| 11.  | Mesir   |
| 12.  | Sudan   |
| 13.  | Libya   |
| 14.  | Irak  |
| 15.  | Lebanon   |
| 16.  | Tunisia   |
| 17.  | Gambia  |
| 18.  | New Caledonia                                       |
| 19.  | Marshall Islands                                    |
| 20.  | Kiribati  |
| 21.  | Tonga   |
| 22.  | Palau   |
| 23.  | Samoa   |
| 24.  | Kazakhstan  |
| Skala B berdasarkan kepentingan pemri di bidang ekonomi (peluang investasi dan kerjasama ekonomi lainnya)                                    |   |
| 25.  | Vietnam   |
| 26.  | Sri Lanka   |
| 27.  | Tanzania  |
| 28.  | Namibia   |
| 29.  | Pakistan  |
| 30.  | Mozambique  |
| 31.  | Senegal   |
| 32.  | Kenya   |
| 33.  | Nigeria   |
| 34.  | Yordania  |
| 35.  | Madagaskar  |
| 36.  | Least Developed Countries in Africa and Middle East |
| 37.  | Ekuador   |
| Skala C difokuskan pada kepentiangan nasional Pemri di bidang sosial budaya diantara peningkatan citra positif Indonesia di negara tersebut. |   |
| 38.  | Uzbekistan  |

| URUTAN PRIORITAS | NEGARA         |
|------------------|----------------|
| 39.              | Kyrgyzstan     |
| 40.              | Bangladesh     |
| 41.              | Suriname       |
| 42.              | Somalia        |
| 43.              | Aljazair       |
| 44.              | Korea Utara    |
| 45.              | Mongolia       |
| 46.              | Maladewa       |
| 47.              | Nepal          |
| 48.              | Bhutan         |
| 49.              | Tajikistan     |
| 50.              | El Salvador    |
| 51.              | Arab Saudi     |
| 52.              | Uganda         |
| 53.              | Maroko         |
| 54.              | Kosta Rika     |
| 55.              | Guatemala      |
| 56.              | Honduras       |
| 57.              | Panama         |
| 58.              | Nikaragua      |
| 59.              | Belize         |
| 60.              | American Samoa |

Sumber: Direktorat kerjasama Teknik, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri 2014

Kebijakan *'look east policy'* untuk memprioritaskan kawasan Pasifik Selatan dalam politik luar negeri Indonesia telah dimulai di masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Dimulai dengan peningkatan dialog melalui *Southwest Pacific Dialogue* (SwPD) dan KSS dalam bentuk peningkatan kapasitas berkelanjutan kepada negara-negara di kawasan Pasifik dan Timor Leste.<sup>40</sup> Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya untuk mereposisi kebijakan luar negeri RI yang selama ini lebih memberi penekanan kepada negara-negara ASEAN dan negara Barat.

<sup>40</sup> Negara-negara Pasifik Berbagai Pengalaman Pada Pelatihan Konservasi Laut di Tegal, [www.kemlu.go.id/Lists/BeritaKemlu/DispForm.aspx?](http://www.kemlu.go.id/Lists/BeritaKemlu/DispForm.aspx?), Jun 7, 2013, diakses 6 November 2014.

Pemerintah Indonesia menyadari kawasan Pasifik Selatan sangat memerlukan bantuan dari negara lain karena kondisi geografisnya yang kurang beruntung. Kawasan ini membutuhkan bantuan untuk menghindarinya dari kecenderungan menjadi negara gagal.<sup>41</sup> Berbagai hambatan telah membuat kawasan ini sulit untuk maju diantaranya wilayah yang sangat kecil, SDM dan populasi penduduk sedikit, tanah yang kurang subur dan ancaman kemusnahan akibat pemanasan global.

Indonesia berkomitmen untuk menjadi partner yang konstruktif bagi pembangunan dan peningkatan kapasitas dari negara-negara di Pasifik Selatan. Indonesia berupaya mengembangkan konektivitas di kawasan Pasifik Selatan sebagai upaya meningkatkan keterhubungan antara masyarakat, baik antara Indonesia dengan kawasan itu, maupun intra kawasan. Di tahun 2014, Indonesia membuka rute penerbangan antara Port Moresby, Papua Nugini dengan Denpasar Bali. Selain tertarik untuk mendorong konektivitas di Pasifik Selatan, Indonesia juga tertarik untuk meningkatkan hubungan perdagangan, sosial dan budaya dengan negara-negara di kawasan tersebut. Program peningkatan kapasitas SDM dalam kerangka KSS diberikan dengan topik yang disepakati bersama. Pada umumnya Indonesia memberikan beasiswa untuk program peningkatan pendidikan dan pelatihan. Diantaranya pelatihan energi listrik mikro hidro, perikanan, pengolahan rumput laut, tata kelola pemerintahan yang baik dan pemberdayaan perempuan. Sebagai contoh, Indonesia memberikan bantuan kepada Kepulauan Solomon melalui berbagai program beasiswa dan pelatihan teknis. Sebagai negara kepulauan, Pemerintahan negara kepulauan Salomon mendapat program pelatihan manajemen wilayah pesisir, hutan mangrove, aktivitas pariwisata dari usaha kecil dan menengah serta proyek-proyek pembangunan wilayah kelautan dan perikanan.

Pendekatan Indonesia yang intensif melalui KSS kepada Pasifik Selatan membuat negara-negara di kawasan ini lebih mengenal dan

<sup>41</sup> Wawancara dengan Baiq Wardhani, dosen Fisip Universitas Airlangga, pada tanggal 24 Juni 2014.

menerima Indonesia dengan terbuka. Dukungan terhadap OPM mulai berkurang di Pasifik Selatan.<sup>42</sup> Hubungan Indonesia dengan *Pacific Island Forum* yang beranggotakan 16 negara di Pasifik Selatan berjalan baik dan Indonesia menjadi salah satu dari 14 mitra dialog aktif dari organisasi tersebut. Keikutsertaan Indonesia sebagai mitra dialog ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan citra Indonesia dan menggalang dukungan terhadap Indonesia.<sup>43</sup> Di tahun 2014, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono diundang sebagai tamu utama Chief Guest (tamu utama) pada KTT ke-2 The Pacific Islands Development Forum yang diselenggarakan di Fiji. Dalam pertemuan tersebut PM Fiji Bainimarama mengakui Indonesia memegang peranan penting di kawasan Pasifik Selatan. Bagi Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri KSS telah menjadi alat diplomasi yang ampuh dalam mendukung diplomasi Indonesia di Pasifik Selatan, melalui KSS sikap negara-negara penerima bantuan di Pasifik Selatan dapat diubah selaras dengan kepentingan Indonesia.

Indonesia mempererat KSS dengan negara-negara Pasifik rumpun Melanesia yang tergabung dalam *Melanesia Spearhead Group* (MSG), yakni Papua Nugini, Vanuatu, Fiji, New Caledonia, dan kepulauan Solomon. Kebijakan ini merupakan tanggapan atas upaya salah satu faksi OPM yakni *West Papua National Coalition for Liberation* (WPNCL) untuk menjadi anggota MSG. KSS dengan MSG meliputi bidang *capacity building* di bidang perikanan dan pertanian, perdagangan dan perekonomian dan Keamanan. Secara khusus dalam kerjasama pembangunan Regional Police Academy Melanesian Spearhead Group, Indonesia pernah memberikan bantuan pelatihan dan pemberian perlengkapan bagi paramiliter dan polisi.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> FGD P3DI dengan Siti Nugraha Maulidiah, Direktur Kerja sama Teknik Direktorat Kerjasama Teknik, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri pada tanggal 11 Juni 2014.

<sup>43</sup> Pacific Island Forum (PIF), <http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=RegionalCooperation&IDP=12&P=Regional&l=id>, diakses 17 Maret 2015.

<sup>44</sup> Persahabatan MSG Dan Indonesia, 13 Januari 2014, <http://www.kodam17cenderawasih.mil.id/tulisan/artikel/persahabatan-msg-dan-indonesia/>, diakses 18 Maret 2015.

Selanjutnya Indonesia memberikan undangan kepada mereka untuk datang ke Papua dan Papua Barat dan melihat langsung pembangunan yang telah dilaksanakan di provinsi tersebut. Dalam rangka "*Promoting Economic Ties & Development Cooperation*" atau kunjungan untuk kerjasama dalam bidang ekonomi dan pembangunan para menteri luar negeri MSG, kecuali Menlu Vanuatu, telah berkunjung ke kedua provinsi tersebut di tahun 2014. Bila dibandingkan dengan negara-negara anggota MSG lainnya, hubungan antara Indonesia dengan Vanuatu tidak bisa dikatakan benar-benar baik. Papua merdeka merupakan isu politis yang selalu dipergunakan para politikus Vanuatu untuk mendapat dukungan politik lokal. Vanuatu menganut konsep "Melanesia Socialism" yang merupakan ideologi sosialisme yang dianggap cocok untuk ras Melanesia, karena mendukung kepemilikan bersama daripada kepemilikan individual. Dalam pelaksanaannya ideologi ini mendorong bersatunya negara-negara Ras Melanesia membentuk pemerintahan sendiri. Bantuan program KSS yang dilakukan Indonesia belum berhasil mengubah kebijakan Vanuatu untuk tidak lagi mendukung OPM untuk membentuk pemerintahan sendiri dan menjadi negara anggota MSG. Hasil kunjungan tersebut menegaskan dukungan MSG kepada NKRI dan menolak WPNCL untuk menjadi anggota MSG.<sup>45</sup>

## B. Kerja Sama Selatan-Selatan dan Pengaruhnya di Daerah

Sebagaimana telah dipaparkan di atas dalam isu separatism Papua, KSS telah berhasil menjadi alat diplomasi politik memperkuat dukungan terhadap NKRI dari negara-negara Pasifik Selatan. Di sisi lain, ada pandangan bahwa kerja sama dan kemitraan dengan

<sup>45</sup> Negara-negara MSG Akui Kedaulatan Indonesia, 16 Januari 2014, <http://www.kodam17cenderawasih.mil.id/dari-media-lain/negara-negara-msg-akui-kedaulatan-indonesia/> dan Menlu RI Bersama Negara Anggota MSG mengeluarkan Joint Statement dalam Kunjungan Ke Indonesia, <http://www.polkam.go.id/Berita/tabid/66/mid/394/newsid394/447/language/en-US/Default.aspx>, diakses 18 Maret 2015.

negara berkembang akan menjadi kekuatan utama untuk meningkatkan perdagangan internasional Indonesia, dan bahwa kerja sama pembangunan akan menjadi “instrumen penting dalam membangun hubungan.” Dengan kata lain, ada dimensi lain yang harus dimasukkan ke dalam kerja sama Selatan-Selatan yang terkait dengan manfaat ekonomi. Bappenas telah mengupayakan terciptanya koherensi Kerja Sama Selatan-Selatan dengan pembangunan ekonomi di dalam negeri dan upaya membuka pintu pemasaran bagi produk-produk Indonesia di pasar-pasar negara nontradisional. Kerja Sama Selatan-Selatan perlu ditindaklanjuti dengan komitmen bersama yang lebih terintegrasi dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. Bappenas dalam hal ini akan terus mendorong mitra terkaitnya, baik di pusat maupun daerah, untuk dapat mengembangkan sektor-sektor unggulan yang dapat dijadikan Kerja Sama Selatan-Selatan.<sup>46</sup>

Sosialisasi tentang KSS kurang dilakukan sehingga manfaat dan tujuan kerja sama ini tidak banyak diketahui. Wajar jika ada banyak pihak yang keberatan jika sebuah negara menghabiskan dana untuk kebutuhan negara lain. Khususnya untuk negara seperti Indonesia, yang persentase jumlah penduduk miskin masih tinggi, akan ada pandangan sinis tentang mengapa Indonesia harus melaksanakan program solidaritas. Patut diperhatikan, bahwa negara-negara penerima bantuan KSS adalah negara yang pada umumnya belum berkembang dengan tingkat perekonomian rendah. Dengan kondisi demikian memang akan sulit bagi Indonesia untuk menerima manfaat secara ekonomi secara cepat dalam nilai yang signifikan. Pada dasarnya KSS adalah proses panjang yang dampaknya baru dapat dirasakan di masa mendatang. Manfaat ekonomi KSS memang tidak segera dapat dirasakan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri hal ini menyebabkan sikap skeptis terhadap manfaat KSS bagi Indonesia, terutama bagi mereka yang mengukur hasilnya

<sup>46</sup> Seminar Nasional Pengembangan Kerja Sama Selatan-Selatan, <http://old.bappenas.go.id/print/2709/seminar-nasional-pengembangan-kerja-sama-selatan-selatan/> diakses 27 Maret 2015.

dari sesuatu yang “tangible” dan dapat dirasakan serta merta, padahal dampak dari KSS bisa saja “intangible”.<sup>47</sup> Manfaat ekonomi yang diharapkan tersebut adalah segera dan makin terbukanya pasar baru bagi produk-produk Indonesia, terutama di negara-negara penerima pelatihan. Mereka diharapkan menjadi *user* dan membeli produk Indonesia.

Memang ini menjadi isu penting bagi kebanyakan negara yang menjadi penyedia kerja sama pembangunan, terutama di saat mereka mencoba merancang dan mengelola hubungan antara politik luar negeri mereka dan kebijakan pembangunan ekonomi mereka.<sup>48</sup> Seiring dengan aktifnya Indonesia dalam memberikan bantuan dalam kerangka KSS, penting bagi Indonesia untuk memperoleh manfaat ekonomi. Dalam era globalisasi saat ini adanya peluang kerja sama ekonomi merupakan kesempatan penting yang dibutuhkan daerah. Kerja sama antar negara berkembang yang terbangun dalam KSS diharapkan memberi peluang tersebut.<sup>49</sup> Sebagai contoh di bidang pertanian, manfaat ekonomi yang diharapkan adalah setelah pelatihan selesai negara penerima pelatihan menjadi membeli peralatan atau benih pertanian atau vaksin produk Indonesia. Namun peningkatan pembelian tersebut sulit terukur karena tidak terdata sebab transaksi yang terjadi antar pihak swasta, sebagai penghasil alat-alat pertanian, seringkali tidak diketahui pihak kementerian pertanian.<sup>50</sup>

Kendala pemanfaatan ekonomi KSS oleh daerah adalah selama ini kebijakan KSS Indonesia masih bersifat *state-centric* terutama pada pemerintah pusat di Jakarta. KSS belum meluas pada maksimalisasi peran daerah, swasta

<sup>47</sup> Esti Andayani, “Dari Negara Penerima Menjadi Negara Pemberi Bantuan”, *Tabloid Diplomasi*, Edisi Agustus 2009.

<sup>48</sup> Gerald F. Hyman, “Foreign Policy and Development: Structure, Process, Policy, and the Drip-by-Drip Erosion of USAID,” Center for Strategic and International Studies Publication (2010), h. 1.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Cipto Wibowo, Kasub Kerjasama Asia Afrika Biro Administrasi Kerjasama Pemda Jatim pada tanggal 25 Juni 2014.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Dadeng Gunawan, Kepala Bidang Regional Pusat Kerja Sama Luar Negeri kementerian Pertanian pada tanggal 2 Juli 2014.

atau masyarakat. Karena masih dipandang sebagai program milik pusat, Pemda belum tersosialisasikan dengan baik mengenai kebijakan ini. Pelaksanaan program pelatihan KSS hanya melibatkan kementerian terkait dengan pelaksanaan di UPT di daerah tanpa keterlibatan Pemda. Dalam hal anggaran pun demikian, karena masih menjadi program pemerintah pusat maka anggaran yang dipergunakan adalah anggaran milik kementerian terkait, padahal keterbatasan anggaran yang dimiliki kementerian terkait menjadi kendala untuk pelaksanaan program yang lebih luas.

Belum maksimalnya partisipasi daerah dalam KSS tidak sejalan semangat otonomi daerah yang dibawa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Saat ini telah ada paradigma baru di daerah untuk senantiasa menawarkan potensi yang dimilikinya sesuai batas kewenangannya.<sup>51</sup> Kewenangan daerah dalam melaksanakan hubungan luar negeri meliputi berbagai aspek yang cukup luas, sepanjang tidak mengambil porsi kewenangan pusat yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.<sup>52</sup> Adapun berbagai bentuk kerjasama daerah yang dimungkinkan meliputi: (1) Kerjasama Ekonomi: (a). Perdagangan; (b). Investasi; (c). Ketenagakerjaan; (d). Kelautan dan Perikanan; (e). Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (f). Kehutanan; (g). Pertanian; (h). Pertambangan; (i). Kependudukan; (j). Pariwisata; (k). Lingkungan Hidup; dan (l). Perhubungan. (2) Kerjasama Sosial Budaya: (a). Pendidikan; (b). Kesehatan; (c). Kepemudaan; (d). Kewanitaan; (e). Olahraga; dan (f). Kesenian. (3) Bentuk Kerjasama Lain.<sup>53</sup>

Dengan terjadinya paradigma baru dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengubah

pemahaman yang selama ini ada bahwa hubungan luar negeri merupakan monopoli Pusat. Berdasarkan prinsip otonomi yang lebih luas, maka kepada daerah dapat diberikan wewenang terbatas untuk dapat melaksanakan hubungan dan kerja sama luar negeri dalam rangka usaha untuk memajukan daerahnya. Dalam hal pelaksanaan KSS, diyakini dengan pelaksanaan yang tepat pengembangan KSS di daerah dapat menjadi peluang bagi daerah untuk pengembangan kapasitas SDM melalui berbagai program pelatihan, pemagangan dan pertukaran ahli.<sup>54</sup> Program KSS juga akan lebih bermanfaat bagi daerah bila dilaksanakan melalui harmonisasi, sinkronisasi berbagai program berbasis donor dengan kebutuhan dan program lokal dan diarahkan kepada visi dan misi daerah, terutama yang terkait pendidikan, kesehatan gratis, pembangunan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan.<sup>55</sup>

Dalam pelaksanaannya pihak daerah menyambut program KSS dengan antusias dan menyangkan minimnya keterlibatan mereka. Dengan penanganan yang tepat daerah siap berpartisipasi dalam KSS, sebagaimana yang pernah dilaksanakan Provinsi Gorontalo – Provinsi Srilanka Selatan di tahun 2008 atas dukungan UNDP. Program ini bertujuan untuk mendorong kerjasama regional di bidang tata pemerintahan daerah, partisipasi masyarakat, pembangunan ekonomi lokal, serta peningkatan akses pelayanan sosial khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam kerja sama itu, sebagai provinsi perintis di Indonesia adalah Gorontalo, sedangkan Sri Lanka menunjuk Southern Province. Bidang kerja sama yang ditawarkan Provinsi Gorontalo adalah budidaya varietas Jagung, sedangkan Provinsi Selatan Sri Lanka menawarkan program Asuransi Petani. Dalam kerja sama ini keuntungan yang didapat provinsi Gorontalo adalah benih Jagung Gorontalo berkesempatan untuk diekspor dan

<sup>51</sup> Noer Indriati, Perjanjian Internasional oleh Daerah Sebagai Kewenangan Otonomi Daerah, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 1 Januari 2010, h. 36 – 42.

<sup>52</sup> Pasal 10 (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

<sup>53</sup> Kementerian Luar Negeri, Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, 2003, h. 16.

<sup>54</sup> M.Faishal Aminuddin, Pengembangan Kerjasama Teknik di Era Otonomi Daerah, *Tabloid Diplomasi*, No. 22 Tahun II, tanggal 15 Agustus – 14 September 2009, Jakarta, Pusdiklat Kementerian Luar Negeri.

<sup>55</sup> Wawancara Winarni Monoarfa Sekda Gorontalo dan jajarannya pada tanggal 16 Juli 2014.

mendapatkan ilmu mengenai Asuransi Pertanian dari Sri Lanka. Program ini dianggap berhasil namun karena kekurangan dukungan dana UNDP program ini tidak berlanjut. Di tahun 2012 Gorontalo ditetapkan menjadi provinsi percontohan KSST di Indonesia oleh United Nations Development Programme (UNDP). Dengan pelaksanaan program yang tepat dan efektif juga akan memudahkan daerah untuk mendapatkan lembaga donor untuk membantu dari segi pembiayaan program. Sebagai provinsi percontohan KSST, Provinsi Gorontalo banyak menerima tawaran kerja sama dari berbagai lembaga donor seperti JICA-Jepang, CIDA-Canada, AusAID-Australia serta Bank Dunia yang sangat berguna bagi pengembangan kapasitas daerah. Gorontalo juga menjadikan provinsi ini tempat belajar bagi provinsi-provinsi lain dalam hal kerja sama internasional. Dengan dukungan dari pihak donor atau pemerintah pusat, Provinsi Gorontalo bersedia untuk menjadi mitra pendamping dan *best practice* bagi program KSS selanjutnya.<sup>56</sup>

Jawa Timur merupakan provinsi yang seringkali menjadi lokasi pelatihan diklat KSS di bidang perikanan dan pertanian, sehingga tidak berlebihan bila provinsi ini menghendaki adanya *feed back* bagi perekonomian daerahnya. Pemda Jatim menyatakan masih banyak potensi ekonomi daerah yang bisa diangkat sebagai tema kerja sama KSS yang bila dilakukan akan sangat bermanfaat namun belum termanfaatkan secara optimal karena terbatasnya informasi mereka miliki. Sebagai contoh, Jatim merupakan provinsi yang terkenal mampu memproduksi aneka macam makanan dengan memanfaatkan hasil laut sehingga akan sangat bermanfaat bila pengetahuan tersebut diajarkan kepada peserta dari negara-negara kepulauan di Pasifik Selatan sebagai sebuah transfer teknologi dan *knowledge-sharing* yang berguna sesuai kondisi negara mereka. Tanpa informasi dan sosialisasi yang memadai Pemda tidak memahami KSS dan kesulitan untuk berpartisipasi menunjukkan potensi dan mempersiapkan daerah untuk

melaksanakan program KSS, termasuk dalam segi anggaran. Dengan sosialisasi yang tepat daerah bersedia membantu dan dilibatkan dari segi pembiayaan, asalkan program KSS yang akan dilaksanakan dikoordinasikan lebih dahulu sebelum penyusunan anggaran dilakukan sehingga program KSS ini dapat masuk dalam rencana kegiatan tahun daerah dan memiliki alokasi anggaran.<sup>57</sup> Dalam hal ini daerah dapat menyediakan tenaga pelatih dan akomodasi, sementara pemerintah pusat menyediakan anggaran untuk transportasi dan biaya hidup peserta selama mengikuti pelatihan.

### C. Membangun Kerja Sama Selatan-Selatan yang Efektif

Kerja sama Selatan Selatan dalam prediksi para ekonomi akan menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 57 persen dari GDP dunia di tahun 2030.<sup>58</sup> Saat ini negara-negara BRICS sudah mulai memaksimalkan peran KSS. Brazil mencatat alokasi untuk KSS sebesar USD 750 juta sementara USD 30 juta yang lain dikelola oleh Brazilian Agency for Cooperation (ABC). Dana tersebut dimanfaatkan untuk program di Guinea Bissau, Sao Tome, Haiti, Venezuela dan Costa Rica. Dalam tahun 2007, India mengalokasikan dana USD 1 miliar untuk KSS ditambah USD 500 juta untuk kegiatan pelatihan dan asistensi teknis bagi 15.000 pelajar dari Afrika. Adanya satu lembaga otonom yang mengurus masalah KSS telah juga ada diantaranya di Malaysia melalui MTCP (Malaysia Technical Cooperation Program), Thailand melalui TICA (Thailand International Development Cooperation Agency), Mesir melalui EICA (Egyptian International Center for Agriculture), Jepang JICA (Japan International Cooperation Agency) India melalui ITEC (Indian Technical and Economic Cooperation), Korea Selatan melalui KOICA (Korean International cooperation Agency),

<sup>56</sup> Wawancara dengan Budiyanto ketua Bappeda Gorontalo pada tanggal 16 Juli 2014.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Cipto Wibowo Kasub Kerja Sama Asia Afrikadan Esti Marti Goenawati Biro Administrasi Kerja sama Pemda Jatim pada tanggal 25 Juni 2015.

<sup>58</sup> M. Faishal Aminuddin, Mengurai Cetak Biru Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) Indonesia, Jurnal Diplomasi Januari 2013.

Australia melalui AusAid, dan Amerika Serikat melalui USAID.

Di Indonesia pelaksanaan KSS belum berjalan secara sempurna, pencapaian saat ini dalam pembentukan mekanisme dan kelembagaan masih jauh dibelakang sasaran yang dituju. Kerja Sama Selatan – Selatan perlu ditindaklanjuti dengan komitmen bersama yang lebih terintegrasi dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. KSS harus direncanakan secara terpadu, dilembagakan, dan diimplementasikan secara lebih baik untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dalam pencapaian pembangunan nasional. Efektifitas KSS sangat tergantung pada ketersediaan anggaran, SDM dan kelembagaan. Saat ini kinerja KSS belum optimal karena pelaksanaan KSS masih tersebar di banyak Kementerian/Lembaga (K/L) sehingga kurang sinergis dan terintegrasi. Menghadapi permasalahan belum optimalnya manfaat pelaksanaan KSS di Indonesia, pemerintah tidak bergeming saja, tetapi melakukan revitalisasi dan penguatan pelaksanaan KSS Indonesia dengan melakukan langkah-langkah berikut: pencantuman KSS Indonesia sebagai salah satu prioritas dalam RPJMN 2010-2014, pembentukan Tim Koordinasi KSS Indonesia yang terdiri dari berbagai K/L terkait dan perwakilan swasta, penyusunan Rencana Induk dan Cetak Biru KSST yang penetapannya disepakati dengan Peraturan Presiden.<sup>59</sup>

Problem klasik yang dihadapi semua penyedia baru dalam kerja sama pembangunan adalah masalah koordinasi di dalam negeri. Hal ini merupakan permasalahan rumit karena terkait dengan prosedur, negosiasi, dan mekanisme evaluasi. Pada tatanan nasional, masalah ini ada dalam menentukan pembagian kerja serta berbagi tanggung jawab di antara para pelaku kunci. Sebagai konsekuensi permasalahan semacam itu akan menghambat pelaksanaan program yang baik. Belajar dari pengalaman negara-negara lain, tampak bahwa peran lembaga bertingkat nasional yang bertanggung jawab atas perencanaan

<sup>59</sup> Tentang pengembangan kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular, 27 Juli 2012, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Setkab.go.id, diakses 18 Maret 2015.

dan pelaksanaan program merupakan suatu keharusan.

Pemerintah telah menyiapkan satu lembaga khusus sebagai wadah penanganan satu pintu bagi kegiatan KSS. Kebijakan satu gerbang ini akan dilaksanakan oleh satu agensi tunggal untuk memastikan efisiensi dan transparansi.<sup>60</sup> Menurut M. Aminuddin Faishal ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Pembentukan lembaga otonom yang menjadi payung berbagai agenda kerja KSS berjalan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas. Lembaga otonom tersebut dapat memberikan fasilitasi terhadap terbentuknya jaringan antar stakeholder dan ada kerangka hukum yang mempertimbangkan aspek nomenklatur hukum di level internasional dan regional. Regulasi yang bersifat responsif di tingkat nasional dan lokal harus berdimensi penguatan ekspansi ekonomi yang ditopang oleh kalangan pelaku bisnis dan perbankan.<sup>61</sup> Dengan melihat contoh yang telah ada di negara lain dapat dikatakan mekanisme koordinasi antar lembaga terkait merupakan salah satu kunci dari kesuksesan agenda KSS Indonesia dimasa yang akan datang. Ditengah keterbatasan pendanaan, pelibatan secara aktif berbagai potensi yang dimiliki oleh sektor swasta, perguruan tinggi, sampai organisasi kemasyarakatan mutlak sangat diperlukan. Koordinasi yang ideal dimulai dengan perencanaan program kegiatan yang berasal dari kebutuhan di masing-masing stakeholder. Oleh sebab itu adanya suatu lembaga yang otonom dan berfungsi penuh sebagai pelaksana KSS dan didukung oleh anggaran yang jelas akan menjamin “sustainability” program-program KSS secara berkelanjutan.

Kerja sama Selatan-Selatan merupakan panggung politik prestise Indonesia. Dalam pelaksanaannya KSS merupakan kerja sama lintas sektor sehingga perlu ada lembaga otonom pelaksana KSS di Indonesia.<sup>62</sup> Lembaga otonom

<sup>60</sup> Tingkatkan Efisiensi, Indonesia Sasar Kebijakan Satu Pintu, Satu Agen untuk Kerjasama Selatan – Selatan, <http://www.kemlu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=7312&l=id>, diakses 19 Maret 2015.

<sup>61</sup> M. Faishal Aminuddin, *op.cit.*

<sup>62</sup> Wawancara dengan Winarni Monoarfa, sekda Pemda Gorontalo dan Budiyanto, ketua Bappeda Pemda Gorontalo pada tanggal 16 Juli 2014.

ini bertugas sebagai agen yang melakukan koordinasi, kompilasi dan memberikan umpan balik terkait dengan arah dan sasaran sesuai dengan kemampuan pemerintah Indonesia. Selain kepentingan prestise sudah seharusnya KSS membawa manfaat yang lebih besar bagi Indonesia secara politik dan ekonomi. Oleh sebab itu, lembaga otonom yang harus terbentuk tersebut juga bertugas sebagai agen yang mencari peluang ekonomi dan alih teknologi yang dibutuhkan Indonesia. Kinerja lembaga dalam KSS tersebut memerlukan kerangka hukum yang bisa menjadi pagar batas konsentrasi dari segenap kegiatan yang dilakukan.

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Perubahan besar dalam tatanan pembangunan internasional telah berlangsung sejak awal abad ke-21. Negara-negara baru dengan pertumbuhan ekonomi tinggi muncul, dan banyak di antaranya mulai memainkan peran penting sebagai penyedia kerja sama pembangunan. Dengan demikian, ada pergeseran menuju pertumbuhan multi-polar yang tidak mengikuti paradigma pembangunan konvensional. Kerja sama Selatan-Selatan merupakan aspek penting dalam menunjang dan menguatkan kerja sama pembangunan, khususnya di antara negara berkembang. Kerja sama ini menjadi kerangka penting untuk berbagi informasi, pengalaman, dan pengetahuan.

Dengan prestasi pembangunan dan posisinya sebagai negara berpenghasilan menengah yang besar, Indonesia memiliki kontribusi yang kuat dalam upaya perbaikan arsitektur bantuan pembangunan internasional. Indonesia terus berupaya menjadi mitra yang andal dan efektif dalam KSS. Mekanisme pembiayaan yang dimiliki oleh Indonesia kini berkembang, sementara kerja sama pembangunan dengan negara-negara berpenghasilan menengah lainnya terus dikembangkan. Dengan keberhasilan pembangunan dan posisinya sebagai negara berpenghasilan menengah yang besar, Indonesia dapat berkontribusi besar dalam

memperbaiki tatanan bantuan pembangunan internasional.

Kebijakan luar negeri KSS merupakan terobosan penting bagi kepentingan nasional Indonesia yang harus terus dipertahankan dan diperkuat. Pemanfaatan KSS bagi kepentingan politik luar negeri Indonesia berhasil memperluas jaringan diplomasi Indonesia di dunia internasional. Terkait dengan pencapaian sasaran tersebut, tantangan terbesar adalah bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan potensi strategisnya secara maksimal dalam konstelasi politik regional dan global. Kebijakan luar negeri KSS akan tetap memainkan peran penting dalam menghadapi berbagai ancaman separatism, terutama guna mencegah adanya internasionalisasi isu-isu separatisme di dalam negeri serta mengupayakan dukungan internasional terhadap integritas wilayah Indonesia. Kerja sama selatan – selatan dipandang semakin relevan sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan global secara keseluruhan. Kerja sama Selatan – Selatan juga dipandang sebagai cara baru untuk “win-win solution” yang memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik pihak yang memberikan pengetahuan, maupun negara penerima

Indonesia diharapkan bisa membangun suatu program pemetaan di bawah KSS. Selain itu, pemetaan tersebut sebaiknya dapat memberikan informasi bagi mitra pembangunan berupa negara mana, sektor mana dan metode apa yang perlu diberikan dukungan. Implementasi KSS di Indonesia selama ini belum berjalan optimal karena tersebar di berbagai kementerian dan seringkali tidak berkelanjutan. Demi efektifitas KSS perlu dibentuk satu lembaga otonom yang secara khusus menangani masalah ini sebagaimana yang ada di beberapa negara. Pengelolaan kebijakannya sepatutnya dilembagakan dan didukung oleh tim yang solid. Koordinasi di antara Kementerian/Lembaga dalam KSST sangatlah diperlukan untuk menetapkan program di masa datang dalam mengkombinasikan kapasitas kementerian-kementerian yang berbeda.

Pemanfaatan KSS bagi kepentingan ekonomi dan daerah masih sangat kecil sehingga belum terasa manfaatnya secara luas. Oleh karena itu keterlibatan daerah dalam program ini masih perlu ditingkatkan. Negara tak lagi menjadi aktor utama dalam melaksanakan peran-perannya dalam kancah hubungan internasional. Salah satu bentuk peningkatan kapasitas diri adalah dengan melalui kerjasama. Keinginan untuk bekerjasama tidak terbatas hanya dengan pemerintah negara saja, tetapi mulai merambah ke pemerintah daerah di negara lain. Adanya kebijakan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri, tidak selalu tergantung pada pemerintah pusat. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya, baik yang berupa potensi alam maupun manusia, untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah agar dapat melaksanakan pembangunan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. KSS memberikan ruang bagi Pemda untuk mengadakan kerjasama dengan daerah lain, karena saat ini kewenangan daerah dalam melaksanakan hubungan luar negeri telah diakui UU meliputi berbagai aspek yang cukup luas, kecuali yang terkait politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.

## B. Saran

Program KSS baik di Indonesia maupun di negara-negara mitra harus sesuai dengan target pembangunan dan kebijakan di negara-negara mitra dan Indonesia. Penting sekali bagi kedua negara yang bekerja sama untuk mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut, sehingga mereka bersedia untuk mengalokasikan sejumlah sumber daya (seperti sumber daya manusia, keuangan dan sarana pendukung) untuk melaksanakan program ini dalam jangka panjang.

Pengembangan program harus dirancang dalam serangkaian kegiatan selama periode waktu tertentu. Sebuah program pembangunan singkat yang dilaksanakan satu kali saja akan berdampak kecil bagi negara-negara mitra dan Indonesia. Dalam merancang program

pembangunan internasional, desain yang komprehensif yang mencakup perencanaan, pelaporan, evaluasi dan selanjutnya menindaklanjuti untuk program masa depan merupakan suatu keharusan.

Proses pelaksanaan KSS perlu ditata secara lebih terintegrasi untuk menyiapkan peran Indonesia yang lebih strategis baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh sebab itu, dukungan dari DPR, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan mitra lainnya terhadap kebijakan pemerintah dalam pengembangan KSS sangat diperlukan. Keterlibatan sektor swasta dalam program KSS harus ditingkatkan. Menyadari keterbatasan anggaran, Pemerintah perlu mendorong keterlibatan sektor swasta dengan menetapkan berbagai aturan terkait mengenai keterlibatan sektor swasta dalam program KSS. Dalam rangka mendorong partisipasi sektor swasta, pemerintah Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi sektor swasta, sehingga terdorong untuk mengeksplor produk mereka dan memiliki hubungan bisnis dengan negara-negara mitra dalam kerangka KSS. Keterlibatan daerah dalam program KSS juga harus ditingkatkan. Hal ini akan membantu pengembangan perenokomian Indonesia, khususnya di sektor di daerah yang akan terlibat langsung dengan kegiatan KSS.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Banyu Perwita, Anak Agung dan Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Hubungan Internasional, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005.

Coulumbus, Theodore A. dan James H. Wolfe, *Introduction to International Relations: Power and Justice*, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, Second Edition, 1982.

- Daymon, C. dan I Holloway. *Metode-metode Riset Kualitatif*, penerjemah Cahya Wirtama, Yogyakarta; Bentang, 2008.
- Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Tahun 2010*, Biro Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
- Mintz, Alex dan Karl De Rouen Jr., *Understanding Foreign Policy Decision Making*, Cambridge University Press, 2010.
- Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, Kementerian Luar Negeri 2003.
- Parthiana, I Wayan., *Hukum Perjanjian Internasional Bagian I*, Bandung, CV Mandar Maju, 2002.
- Chandra, Prakash., *Theories of International Relations*, New Delhi, Vikas Publishing House, 2008.
- Sabrie, M., *Politik Bebas Aktif*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1997.
- Shaw, Malcolm N., *International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
- Nye Jr, Joseph S., *Soft Power – The Means to Success in The World Politics*, Public Affairs, NY; 2004.
- JURNAL**
- Andayani, Esti., "Dari Negara Penerima Menjadi Negara Pemberi Bantuan", *Tabloid Diplomasi*, Edisi Agustus 2009.
- Aminuddin, M. Faishal., Pengembangan Kerjasama Teknik di Era Otonomi Daerah, *Tabloid Diplomasi*, *Tabloid Diplomasi*, No.22 Tahun II, tanggal 15 Agustus – 14 September 2009, Jakarta, Pusdiklat Kementerian Luar Negeri.
- \_\_\_\_\_, Mengurai Cetak Biru Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) Indonesia, *Jurnal Diplomasi* Januari 2013.
- Ashoff, Guido. "Triangular Cooperation: Opportunities, Risks, and Conditions for Effectiveness," *Development Outreach*, terbitan 10/08/2010 The World Bank Institute, 2010.
- Brotodiningrat, Soemadi D.M., Grand Design Baru Kerja Sama Selatan-Selatan, *Jurnal Diplomasi*, Kementerian Luar Negeri, edisi April 2012.
- Hyman, Gerald F. "Foreign Policy and Development: Structure, Process, Policy, and the Drip-by-Drip Erosion of USAID," Center for Strategic and International Studies Publication (2010)
- Indriati, Noer., Perjanjian Internasional oleh Daerah Sebagai Kewenangan Otonomi Daerah, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.10 No.1 Januari 2010.
- KORAN**
- Faizasyah, Teuku, "Kebijakan Luar Negeri Pasca-SBY", *Kompas*, 26 April 2014.
- Mc Ray, David. "Membaca Kebijakan Luar Negeri Indonesia", *Kompas*, 5 Maret 2014
- Nye Jr, Joseph S., "Propaganda Isn't the way: Soft Power," *International Herald Tribune*, 10 Januari 2003.
- SBY Kunjungi Fiji untuk Jelaskan Kondisi Papua", diakses 6 November 2014
- INTERNET**
- A New Foreign Policy Era, [http://www.pearsonhighered.com/assets/hip/us/hip\\_us\\_pearsonhighered/samplechapter/0205853641.pdf](http://www.pearsonhighered.com/assets/hip/us/hip_us_pearsonhighered/samplechapter/0205853641.pdf) diakses 14 April 2014.
- Abuzeid, Farah. Foreign Aid and the "Big Push" Theory: Lessons from Sub-Saharan Africa, *Stanford Journal of International Relations*, Vol. XI no.1, Fall, 2009. [https://web.stanford.edu/group/sjir/pdf/Aid\\_11.1.pdf](https://web.stanford.edu/group/sjir/pdf/Aid_11.1.pdf), diakses 18 Maret 2015.
- Boediono: Negara Selatan-Selatan Harus Siap Hadapi Tantangan, 10/130754/1961963/4/1/boediono— Negara-selatan-selatan-harus-siap-hadapi-tantangan, diakses 6 November 2014.

- CSIS, Laporan Khusus tentang Kerja Sama Selatan-Selatan (2010) dalam Studi mengenai Implementasi Kebijakan dan Strategi Kemitraan Pendanaan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular, 22 December 2014, <http://www.csis.or.id/index.php/research/past-research/studi-mengenai-implementasi-kebijakan-dan-strategi-kemitraan-pendanaan-kerja-sama-selatan-selatan-dan-triangular.html>, diakses 25 Maret 2015.
- Gorontalo Harus Punya Lembaga Khusus Kerjasama, 9 November 2012, <http://www.gorontaloprov.go.id/pemerintahan/236-gorontalo-harus-punya-lembaga-khusus-kerjasama?tmpl=component&print=1&page=> diakses 14 April 2014.
- Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kerja Sama Selatan-Selatan, "What is South-South Cooperation?" ([http://ssc.undp.org/content/ssc/about/what\\_is\\_ssc.html](http://ssc.undp.org/content/ssc/about/what_is_ssc.html)) diakses 26 Maret 2015.
- Kemlu Kuatkan Kerjasama Selatan-Selatan Melalui Program yang Terintegrasi, 2013, <http://www.kemlu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=6084&l=id>, diakses 20 Maret 2015.
- Membangun Simpul Jaringan Pengetahuan AntarNegara Berkembang, siaran pers The World Bank, 10 Juli 2012, <http://www.worldbank.org/> diakses 23 Oktober 2014.
- Menlu Buka Program Kerja Sama Selatan-Selatan, April 9, 2012, diakses 11 April 2014.
- Menlu RI Bersama Negara Anggota MSG mengeluarkan Joint Statement dalam Kunjungan Ke Indonesia, <http://www.polkam.go.id/Berita/tabid/66/mid/394/newsid394/447/language/en-US/Default.aspx>, diakses 18 Maret 2015.
- Negara-negara Pasifik Berbagi Pengalaman Pada Pelatihan Konservasi Laut di Tegal, [www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id), Jun 7, 2013, diakses 6 November 2014.
- Negara-negara MSG Akui Kedaulatan Indonesia, 16 Januari 2014, <http://www.kodam17cenderawasih.mil.id/dari-media-lain/negara-negara-msg-akui-kedaulatan-indonesia/>, diakses 18 Maret 2015.
- Pacific Island Forum (PIF), <http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=RegionalCooperation&IDP=12&P=Regional&l=id>, diakses 17 Maret 2015.
- Persahabatan MSG Dan Indonesia, 13 Januari 2014, <http://www.kodam17cenderawasih.mil.id/tulisan/artikel/persahabatan-msg-dan-indonesia/>, diakses 18 Maret 2015.
- Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/Kp/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah, <http://www.kemlu.go.id/Books/Buku%20Panduan%Umum%20Tata%Cara%20Hub%20dan%20Kerjasama%0LN%20oleh%20Pemda.pdf> diakses 14 April 2014.
- Republic of Indonesia Case Study for Indonesia's Capacity of South-South and Triangular Cooperation, Maret 2013, JICA and (LPEM-FEUI). <http://ssc.undp.org/content/dam/ssc/dgspaces/Japan/files/130605%20Indoensia,%20Case%20Study%20for%20Indonesia%E2%80%99s%20Capacity%20of%20SSTC.pdf> diakses 4 November 2014.
- Seminar Nasional Pengembangan Kerja Sama Selatan-Selatan, <http://old.bappenas.go.id/print/2709/seminar-nasional-pengembangan-kerja-sama-selatan-selatan/> diakses 27 Maret 2015.
- Tingkatkan Efisiensi, Indonesia Sasar Kebijakan Satu Pintu, Satu Agen untuk Kerjasama Selatan-Selatan, <http://www.kemlu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=7312&l=id>, diakses 19 Maret 2015.

## **MAKALAH**

Choesni, Tb. A., Kebijakan Kerja sama Pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia, FGD P3DI dengan Direktorat Kerja sama Pembangunan Internasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS pada tanggal 11 Juni 2014.

Maulidiah, Siti Nugraha., Makalah Pelaksanaan Kerja Sama Teknik Luar Negeri Indonesia, disampaikan oleh pada Forum Badan Kehumasan di Bogor 16 September 2013

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah